

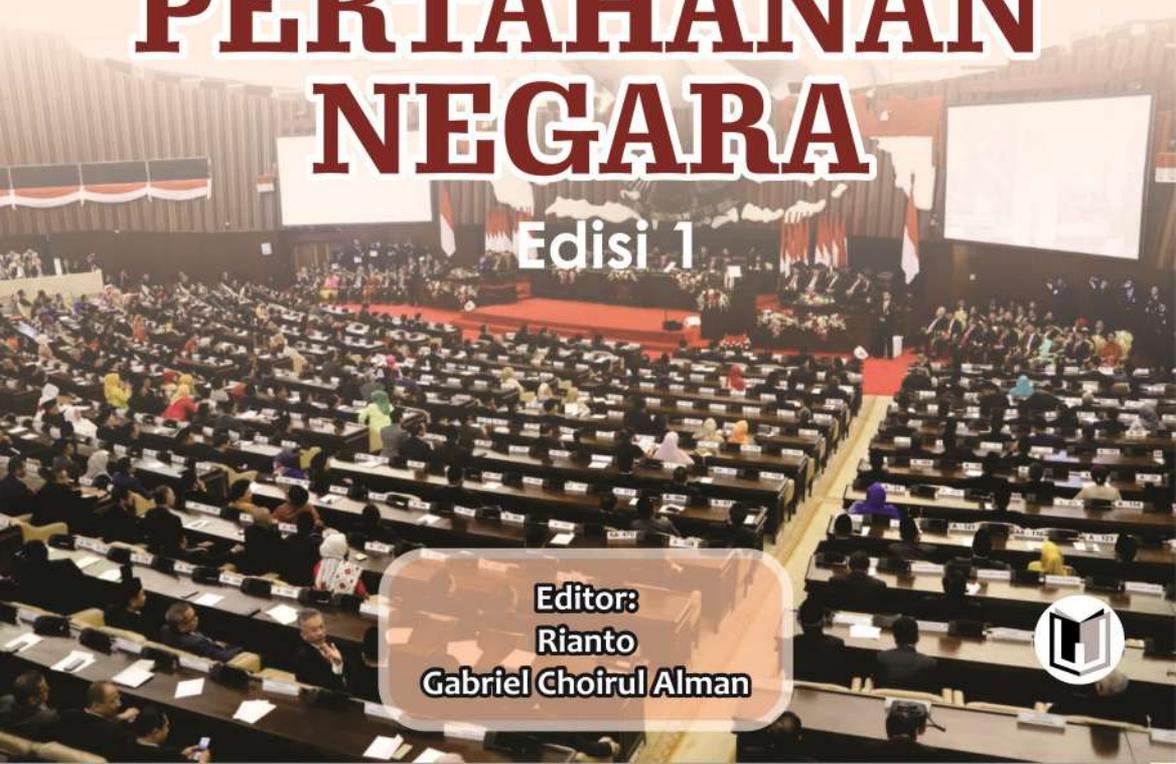
Tim Penulis:

**Lukman Yudho Prakoso, Asep Iwa Soemantri, Agus Adriyanto,
Rudy Sutanto, Tasdik Mustika Alam, Budi Pramono, Ivan Yulivan,
Setiawan Arismunandar, Guntur Eko Saputro, Zahrotul Khumairoh**



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Edisi 1



**Editor:
Rianto
Gabriel Choirul Alman**



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Edisi 1

Tim Penulis:

**Lukman Yudho Prakoso, Asep Iwa Soemantri, Agus Adriyanto,
Rudy Sutanto, Tasdik Mustika Alam, Budi Pramono, Ivan Yulivan,
Setiawan Arismunandar, Guntur Eko Saputro, Zahrotul Khumairoh**



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Edisi 1

Tim Penulis:

**Lukman Yudho Prakoso, Asep Iwa Soemantri, Agus Adriyanto,
Rudy Sutanto, Tasdik Mustika Alam, Budi Pramono, Ivan Yulivan,
Setiawan Arismunandar, Guntur Eko Saputro, Zahrotul Khumairoh**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Rianto

Gabriel Choirul Alman

ISBN:

978-623-500-164-7

978-623-500-163-0 (PDF)

Cetakan Pertama:

Mei, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika geopolitik yang terus berkembang, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pertahanan negara menjadi semakin penting bagi setiap warga negara. Buku ini, dengan judul "Dinamika Kebijakan Pertahanan Negara", merupakan sebuah upaya untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang strategi dan kebijakan yang mendasari pertahanan suatu negara.

Kebijakan pertahanan tidak lagi hanya menjadi domain eksklusif para ahli strategi militer, tetapi juga menjadi isu yang relevan bagi masyarakat umum. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menjelajahi berbagai aspek penting yang terkait dengan kebijakan pertahanan, mulai dari analisis ancaman keamanan hingga implementasi strategi pertahanan dalam konteks global yang semakin kompleks.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, serta kepada para pembaca yang telah memilih untuk menyempatkan waktu mereka untuk membaca dan mempelajari isi buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas kebijakan pertahanan negara.

Selamat membaca.

Jakarta, Mei 2024

Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., S.I.P., M.A.P., M.Tr.Opsla., IPU., ASEAN Eng

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR DAN TEORI KEBIJAKAN NEGARA	1
A. Teori-Teori Dasar Kebijakan Negara	2
B. Mekanisme Pembuatan Kebijakan Negara	3
C. Kebijakan Pertahanan dan Kebijakan Bidang Lainnya	5
BAB 2 MODEL DAN PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN NEGARA	7
A. Model dan Pendekatan	8
B. Pokok-Pokok Kebijakan Negara	9
C. Pokok-Pokok Kebijakan Pertahanan Negara	11
BAB 3 KEBIJAKAN MARITIM	13
A. Kajian Pokok-Pokok Kebijakan Maritim	14
B. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Kebijakan Pertahanan Maritim	15
C. Studi Kasus Kebijakan Maritim di Indonesia	17
D. Model Kebijakan Maritim di Negara Lain	18
E. Kebijakan Maritim Indonesia Emas 2045	19
F. Landasan Teori Kebijakan Maritim	21
G. Dikotomi Doktrin Negara Maritim dan Negara Kontinental	23
H. Kebijakan Maritim dan Kebijakan Pertahanan Pulau Besar	26
BAB 4 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL	29
A. Tentang Kedaulatan Negara	30
B. Tentang Yurisdiksi Nasional	31
C. Permasalahan Sumber Daya Nasional, Yang Berkaitan Dengan Ancaman dan Permasalahan Kedaulatan Negara	32
D. Hilirisasi Pengelolaan Sumber Daya Nasional	34
BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN MILITER	37
A. Konsep Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer	38
B. Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer Dalam Penerapan dan Perspektif Strategi Pertahanan Laut	39
C. Kendala Pembangunan Postur Pertahanan Militer Dalam Penerapan dan Perspektif Strategi Pertahanan Laut	40
D. Model Negara Asing Dalam Pembangunan Pertahanan Militer	42

BAB 6 KEBIJAKAN PENERAHAN PERTAHANAN NIRMILITER	45
A. Dasar Kebijakan Negara Terkait Pertahanan Nirmiliter.....	46
B. Konsep Pertahanan Nirmiliter	47
C. Konsep Penerahan Pertahanan Nirmiliter.....	48
D. Permasalahan Dalam Penerahan Pertahanan Nirmiliter	50
E. Leading Sektor Pertahanan Nirmiliter	51
BAB 7 KEBIJAKAN PENERAHAN PERTAHANAN MILITER.....	55
A. Kebijakan Negara Terkait Pertahanan Militer	56
B. Konsep Pertahanan Militer.....	57
C. Konsep Penerahan Pertahanan Militer	58
D. Permasalahan Yang Dihadapi Pertahanan Militer.....	60
E. Strategi Terbaik Pertahanan Militer Indonesia Emas 2045	61
F. Peran Diplomasi Pertahanan Negara Untuk Mendukung Indonesia Emas 2045	65
G. Integrasi Kebijakan Pertahanan Militer dan Nonmiliter.....	68
H. Kebijakan Negara Komponen Cadangan	71
I. Kebijakan Komponen Pendukung Pertahanan	74
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB 1

PENGANTAR DAN TEORI KEBIJAKAN NEGARA

Kebijakan negara adalah seperangkat rencana, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan pendidikan hingga lingkungan dan keamanan nasional. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam memahami kebijakan negara:¹

Tujuan: Setiap kebijakan negara dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dan bisa meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Proses Pembuatan Kebijakan: Proses pembuatan kebijakan melibatkan serangkaian langkah yang kompleks. Ini bisa termasuk pengumpulan data, analisis masalah, pembahasan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), penyusunan rancangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan implementasi serta evaluasi kebijakan tersebut.

Pengambil Keputusan: Kebijakan negara biasanya diambil oleh badan atau lembaga pemerintah yang berwenang, seperti kabinet, parlemen, atau lembaga eksekutif. Proses pengambilan keputusan dapat melibatkan berbagai aktor, termasuk pejabat pemerintah, ahli kebijakan, akademisi, dan kelompok kepentingan lainnya.

Implikasi: Setiap kebijakan negara memiliki implikasi yang bisa signifikan bagi masyarakat dan ekonomi. Implikasi ini bisa bersifat positif maupun negatif, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti lapangan pekerjaan, harga barang dan jasa, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi dan Revisi: Kebijakan negara harus dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini dapat mengarah pada revisi atau perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Keterbukaan dan Akuntabilitas: Penting untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan negara. Ini termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan, partisipasi publik dalam proses tersebut, serta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil.

¹ BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157950/perpres-no-8-tahun-2021>, diakses tanggal 6 Mei 2024

BAB 2

MODEL DAN PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN NEGARA

Analisis kebijakan negara adalah proses evaluasi dan pemahaman terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam berbagai bidang kebijakan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dibentuk, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.⁴

Dalam analisis kebijakan negara, beberapa langkah yang umumnya dilakukan meliputi:

Identifikasi Isu atau Masalah: Identifikasi masalah atau isu yang menjadi fokus kebijakan negara. Hal ini bisa meliputi masalah ekonomi, keamanan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau isu-isu lain yang dianggap penting oleh pemerintah.

Analisis Kebutuhan dan Tujuan: Menganalisis kebutuhan yang mendasari pembentukan kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menangani isu tersebut.

Penelusuran Alternatif Kebijakan: Menelusuri berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk menangani isu atau masalah yang ada. Setiap alternatif kebijakan memiliki konsekuensi dan dampak yang berbeda, sehingga perlu dipertimbangkan dengan seksama.

Evaluasi Kebijakan yang Ada: Mengevaluasi kebijakan yang sudah ada atau sedang diterapkan oleh pemerintah untuk melihat efektivitas, efisiensi, dan relevansinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perumusan Kebijakan Baru: Jika diperlukan, merumuskan kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Implementasi Kebijakan: Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk alokasi sumber daya, pembuatan regulasi, dan pelaksanaan program-program yang terkait.

⁴ BPSDM Sulawesi Selatan, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>, diakses tanggal 6 Mei 2024.

BAB 3

KEBIJAKAN MARITIM

Kebijakan Maritim adalah serangkaian langkah dan strategi yang dirancang oleh suatu negara untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya dan wilayah lautnya, melindungi keamanan dan kedaulatan maritim, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah maritim tersebut. Kebijakan Maritim mencakup berbagai aspek, termasuk pertahanan maritim, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur maritim, pengembangan ekonomi maritim, perlindungan lingkungan laut, kerjasama maritim regional dan internasional, serta pemberdayaan masyarakat maritim.⁸

Secara umum, kebijakan maritim bertujuan untuk:

Memanfaatkan potensi sumber daya laut: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut seperti ikan, minyak dan gas bumi, mineral, energi terbarukan, serta kekayaan biologis lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara dan masyarakat yang bergantung pada laut.

Melindungi kedaulatan dan keamanan maritim: Mempertahankan kedaulatan negara di wilayah lautnya, melindungi perbatasan maritim dari ancaman seperti invasi militer, pencurian sumber daya, dan tindakan ilegal lainnya, serta mengatasi ancaman keamanan seperti terorisme maritim dan perdagangan ilegal.

Mengelola lingkungan laut secara berkelanjutan: Menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung pelestarian ekosistem laut, mengurangi pencemaran laut, memulihkan habitat terumbu karang, dan mengatasi dampak perubahan iklim terhadap laut.

Meningkatkan konektivitas maritim: Membangun infrastruktur maritim seperti pelabuhan, dermaga, jalur pelayaran, dan fasilitas transportasi laut lainnya untuk meningkatkan konektivitas antar-pulau, memfasilitasi perdagangan laut, dan mendukung pariwisata maritim.

Mendorong pembangunan ekonomi maritim: Mengembangkan sektor-sektor ekonomi maritim seperti perikanan, kelautan, pariwisata, industri galangan kapal, logistik, dan perdagangan internasional untuk menciptakan

⁸ Universitas Indonesia, <https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-menjadi-poros-maritim-dunia/>, diakses tanggal 6 Mei 2024

BAB 4

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL

Pengelolaan sumber daya nasional adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara secara berkelanjutan dan optimal. Sumber daya nasional meliputi berbagai aset alam seperti hutan, lahan, air, mineral, energi, dan sumber daya laut yang menjadi bagian penting dari kekayaan negara dan keberlanjutan pembangunan.¹³

Pengelolaan sumber daya nasional melibatkan beberapa aspek penting, termasuk:

Pengelolaan Berbasis Ekosistem: Memperhatikan kelestarian ekosistem dan keseimbangan alam dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pelestarian habitat, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Pemanfaatan Berkelanjutan: Memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Regulasi dan Pengawasan: Menerapkan regulasi yang tepat dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, perusakan lingkungan, dan penyalahgunaan sumber daya lainnya.

Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dan komunitas adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, dan pembagian manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam.

Pembangunan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah, lembaga pengelolaan lingkungan, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pelatihan, pendidikan, dan transfer teknologi.

¹³ BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123685/uu-no-23-tahun-2019>, diakses tanggal Mei 2024.

BAB 5

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN MILITER

Postur pertahanan militer mengacu pada struktur, kemampuan, dan kesiapan militernya suatu negara untuk melindungi diri dari ancaman yang mungkin timbul dari dalam maupun luar negeri. Ini mencakup berbagai aspek termasuk kekuatan personel, peralatan militer, strategi pertahanan, dan kebijakan keamanan nasional yang ditetapkan oleh suatu negara.

Berikut adalah beberapa komponen penting dari postur pertahanan militer:¹⁷

Kekuatan Personel: Postur pertahanan militer melibatkan jumlah dan kualitas personel militer yang dimiliki oleh suatu negara, termasuk angkatan darat, laut, udara, serta unit khusus dan pasukan cadangan. Ini termasuk juga pelatihan dan kesiapan personel untuk berbagai skenario konflik.

Peralatan dan Teknologi: Postur pertahanan militer mencakup peralatan militer seperti pesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur, senjata, dan peralatan komunikasi yang digunakan untuk operasi militer dan pertahanan wilayah. Peralatan ini harus dipelihara dengan baik dan diperbaharui secara teratur untuk memastikan kesiapan militer.

Strategi Pertahanan: Ini mencakup strategi dan doktrin pertahanan yang diterapkan oleh suatu negara untuk melindungi wilayahnya dari ancaman, baik itu dalam bentuk serangan militer konvensional, serangan teroris, atau ancaman cyber. Strategi ini dapat meliputi doktrin penggunaan kekuatan, penempatan pasukan, dan integrasi alat pertahanan nasional.

Kesiapan Operasional: Postur pertahanan militer juga mencakup kesiapan operasional angkatan bersenjata dalam menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Ini meliputi latihan militer, pemeliharaan peralatan, perencanaan operasi, dan pengawasan atas posisi dan aktivitas musuh potensial.

Kebijakan Keamanan Nasional: Kebijakan keamanan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah juga merupakan bagian penting dari postur pertahanan militer. Ini mencakup penentuan prioritas keamanan, alokasi sumber daya, kerjasama pertahanan internasional, serta upaya diplomasi untuk mencegah konflik dan memperkuat kerja sama keamanan regional.

¹⁷ Prabowo Subiyanto, <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>, tanggal 6 Mei 2024.

BAB 6

KEBIJAKAN Pengerahan PERTAHANAN NIRMILITER

Pertahanan nirmiliter merujuk pada serangkaian strategi, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan instrumen-instrumen non-kekerasan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.²²

Berikut adalah beberapa elemen kunci dari pertahanan nirmiliter:

Diplomasi: Diplomasi adalah instrumen utama dalam pertahanan nirmiliter. Negara menggunakan diplomasi untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, memfasilitasi dialog, mediasi konflik, dan mencapai kesepakatan diplomatik dalam rangka mencapai kepentingan nasional tanpa perlu menggunakan kekuatan militer.

Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional merupakan bagian integral dari pertahanan nirmiliter. Negara bekerja sama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga internasional untuk memperkuat keamanan regional dan global, membangun kepercayaan, dan mengatasi tantangan bersama seperti terorisme, perdagangan manusia, dan perubahan iklim.

Pengembangan Kapasitas Non-Militer: Pertahanan nirmiliter mencakup pengembangan kapasitas dalam bidang-bidang non-militer seperti pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidakesetaraan, dan menciptakan kondisi yang mendukung stabilitas dan perdamaian.

Diplomasi Ekonomi: Pertahanan nirmiliter juga melibatkan penggunaan diplomasi ekonomi untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Ini termasuk kerjasama ekonomi, investasi asing, perdagangan internasional, dan sanksi ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku negara lain tanpa perlu menggunakan kekuatan militer.

²² Lemhanas RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000162/swf/4233/files/basic-html/page8.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.

BAB 7

KEBIJAKAN PENGERAHAN PERTAHANAN MILITER

Pertahanan militer adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara atau entitas untuk melindungi wilayahnya, kepentingan nasional, serta masyarakatnya dari ancaman, serangan, atau agresi dari luar. Ini melibatkan penggunaan kekuatan militer, termasuk pasukan darat, laut, udara, dan sumber daya terkait lainnya, untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keamanan dalam negeri.²⁷

Pertahanan militer memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

Mempertahankan Kedaulatan dan Wilayah: Pertahanan militer bertujuan untuk melindungi wilayah suatu negara dari invasi atau agresi militer dari pihak luar. Ini mencakup pertahanan terhadap serangan darat, laut, dan udara yang bertujuan untuk menguasai atau merampas wilayah suatu negara.

Menjaga Keamanan dan Stabilitas: Pertahanan militer juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri dengan menanggulangi ancaman dalam negeri, termasuk pemberontakan, terorisme, atau kejahatan bersenjata lainnya. Hal ini mencakup pengamanan perbatasan, pemeliharaan ketertiban umum, dan penegakan hukum.

Menjamin Kedaulatan Maritim dan Udara: Bagi negara yang memiliki wilayah maritim atau udara yang luas, pertahanan militer juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan di sektor tersebut. Ini termasuk patroli laut, pengawasan udara, dan penegakan hukum di wilayah-wilayah tersebut.

Mendukung Kebijakan Luar Negeri: Pertahanan militer dapat digunakan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk dalam hal menjaga kemitraan dan aliansi, memberikan bantuan militer kepada negara-negara sahabat, atau berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional.

Pertahanan militer sering kali merupakan bagian integral dari strategi keamanan nasional suatu negara dan dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari persenjataan dan pelatihan militer hingga strategi perencanaan pertahanan yang lebih luas.

²⁷ STEM, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pertahanan_militer, diakses tanggal 6 Mei 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Mardian, <https://annisamardiana.wordpress.com/2012/10/28/model-dan-pendekatan-dalam-analisis-kebijakan-publik/>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Art, Robert J. dan Kenneth N. Waltz (eds.). 2009. "The Use of Force: Military Power and International Politics." New York: Rowman & Littlefield.
- Bappenas,
<https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Baylis, John, James J. Wirtz, dan Colin S. Gray (eds.). 2016. "Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies." New York: Oxford University Press.
- Betts, Richard K. 2017. "American Force: Dangers, Delusions, and Dilemmas in National Security." New York: Columbia University Press.
- Boot, Max. 2003. "The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power." Basic Books.
- BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123685/uu-no-23-tahun-2019>, diakses tanggal Mei 2024.
- BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157950/perpres-no-8-tahun-2021>, iakse tanggal 6 Mei 2024
- BPSDM Sulawesi Selatan,
<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>, diakses tanggal 6 Mi 2024.
- Brooks, Stephen G., G. John Ikenberry, dan William C. Wohlforth (eds.). 2013. "The Oxford Handbook of the International Relations of Asia." Oxford University Press.
- Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. 1998. "Security: A New Framework for Analysis." Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Cohen, Eliot A. 2008. "Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime." Simon & Schuster.
- Connie Rahakundini Bakrie,
https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=726&keywords=, diakses tanggal 6 Mei 2024.

- Cornelis, <https://kalbarprov.go.id/berita/cornelis-perbedaan-harus-menjadi-kekuatan-pertahanan-negara-nirmiliter.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Fettweis, Christopher J. 2009. "Dangerous Times?: The International Politics of Great Power Peace." Georgetown University Press.
- Freedman, Lawrence. 2013. "Strategy: A History." Oxford University Press.
- Galula, David. 2006. "Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice." Praeger.
- Gompert, David C. 2017. "War with China: Thinking Through the Unthinkable." Rand Corporation.
- Gramedia BI, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- Gray, Colin S. 1999. "Modern Strategy." New York: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel P. 1996. "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order." Simon & Schuster.
- Johnston, Alastair Iain dan Robert S. Ross (eds.). 2014. "New Directions in the Study of China's Foreign Policy." Stanford University Press.
- Kagan, Robert. 2007. "The Return of History and the End of Dreams." New York: Alfred A. Knopf.
- Kapstein, Ethan B. dan Michael Mastanduno (eds.). 2007. "Unipolar Politics: Realism and State Strategies After the Cold War." Columbia University Press.
- Kemenhan RI, <https://www.kemhan.go.id/2015/06/12/kementerianlembaga-menjadi-unsur-utama-menghadapi-ancaman-pertahanan-nirmiliter.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WIRA-MASTER-JAN-FEB2021-rev-JAKUMHANEG-19april2021INDONESIAKomplit.pdf>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- Kilcullen, David. 2009. "The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One." Oxford University Press.
- Kominfo, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/08111711/konsep-pertahanan-rakyat-semesta-lima-tahun-ke-depan-ala-prabowo?page=all>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Lemhanas RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000162/swf/4233/files/basic-html/page8.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Lemhanas RI, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1698-kelemahan-industri-pertahanan-indonesia-stagnasi>

alokasi-anggaran-ekosistem-industri-penelitian-dan-pengembangan-serta-skala-ekonomi, diakses tanggal 6 Mei 2024.

Mahan, Alfred Thayer. 2013. "The Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783." Dover Publications.

Mahkamah Konstitusi RI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17608>, diakses tanggal 6 Mei 2024.

Mearsheimer, John J. 2001. "The Tragedy of Great Power Politics." W.W. Norton & Company.

Menlhk, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/tahapan_pembuatan_kebijakan.html, diakses tanggal 6 Mei 2024

Pape, Robert A. 2010. "Bombing to Win: Air Power and Coercion in War." Cornell University Press.

Posen, Barry R. 2014. "Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy." Cornell University Press.

Rose, Gideon. 2014. "How Wars End: Why We Always Fight the Last Battle." Simon & Schuster.

Rumsfeld, Donald. 2011. "Known and Unknown: A Memoir." Sentinel.

Sandler, Todd dan Keith Hartley. 2007. "Handbook of Defense Economics." Volume 2. Amsterdam: North Holland.

Shultz, Richard H., Roy Godson, dan Ted Gover. 2008. "Security Studies for the 21st Century." Potomac Books

Snyder, Glenn H. dan Paul D. Diesing. 2014. "Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises." Princeton University Press.

STEM, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pertahanan_militer, diakses tanggal 6 Mei 2024.

Storr, Jim dan Larry P. Goodson (eds.). 2004. "Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban." University of Washington Press.

Universitas Katoik Parahyangan, <https://unpar.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-bagaimana-tantangan-dan-perkembangannya/>, diakses tanggal 6 Mei 2024.

Universitas Katoik Parahyangan, <https://unpar.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-bagaimana-tantangan-dan-perkembangannya/>, diakses tanggal 6 Mei 2024.

- Univrsits Pattmiura, <https://unpatti.ac.id/2021/08/09/permasalahan-dan-solusi-sekitar-industri-maritim-di-wilayah-perairan-indonesia/>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Walt, Stephen M. 2018. "The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy." New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Waltz, Kenneth N. 2001. "Man, the State, and War: A Theoretical Analysis." New York: Columbia University Press.
- Wohlforth, William C. 2015. "America Abroad: The United States' Global Role in the 21st Century." Oxford University Press.
- Zakheim, Dov S., Daniel Goure, dan David A. Ochmanek. 2001. "A Vulcan's Tale: How the Bush Administration Mismanged the Reconstruction of Afghanistan." Potomac Books.
- Universitas Indonesia, <https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-menjadi-poros-maritim-dunia/>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- Antara, <https://www.antaranews.com/berita/3753006/tni-al-proyeksikan-kekuatan-2025-2045-soroti-ancaman-modernv>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Mabes TI, <https://tni.mil.id/view-4979-postur-tni-sesuai-undang-undang-no34-tahun-2004.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Mabes TNI, <https://tni.mil.id/view-4979-postur-tni-sesuai-undang-undang-no34-tahun-2004.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Prabowo Subiyanto, <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>, tanggal 6 Mei 2024.
- Muhammad Ridwan,
<https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Kementerian MSDM RI, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-3-kedaulatan-negara-dalam-pengusahaan-migas>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- JDIH Kemenko Marves RI, <https://jdih.maritim.go.id/en/wilayah-yurisdiksi-indonesia>, diakses tanggal 6 Mei 2024

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Edisi 1

Buku ini adalah sebuah karya yang mengungkapkan esensi dari strategi pertahanan suatu negara di tengah dinamika global yang terus berubah. Buku ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, mulai dari ancaman konvensional hingga ancaman cyber yang semakin kompleks.

Dengan menggali berbagai aspek kebijakan pertahanan, penulis membahas peran strategis yang dimainkan oleh kebijakan pertahanan dalam menjaga kedaulatan suatu negara dan melindungi kepentingan nasionalnya. Mulai dari analisis terhadap ancaman regional hingga strategi pertahanan yang adaptif, buku ini mengajak pembaca untuk memahami dinamika yang melandasi pembentukan kebijakan pertahanan di berbagai tingkatan, baik nasional maupun internasional. Lebih jauh lagi, buku ini menyoroti isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan keamanan, seperti terorisme, konflik antarnegara, dan perubahan iklim, serta bagaimana kebijakan pertahanan dapat menjadi instrumen untuk menanggapi tantangan-tantangan tersebut secara efektif.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berimbang, buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kompleksitas kebijakan pertahanan modern dan memahami peran krusialnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Buku ini ditulis dengan gaya yang lugas namun informatif, buku ini cocok sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa, praktisi keamanan, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana suatu negara mengelola tantangan-tantangan keamanan dalam konteks global yang terus berubah.